

Mengurai Dinamika Bumkam Pusat Anugerah Melalui Pendampingan Dan Pemetaan Potensi Di Kampung Yuwanain

Unraveling The Dynamics Of Pusat Anugerah Village-Owned Enterprise Through Mentoring And Potential Mapping In Yuwanain Village

**Tarisa Everalda Sainyakit Nanthi^a, Nabila Yulianty Simanjorang^b, Mathilda
Firdayanti Lelang^c, Lois Bemey^d, Dimas Nugroho^e, Irianti Wandagau^f, Kevin
Christian Mansawan^g, Vivaldi Virgo Jitmau^h, Kristina Yogiⁱ, Elia Madatu
Tandililingi, Gian Giovania^k**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih, Jayapura,
Indonesia^{a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k}
tarissaaa09@gmail.com^a

Abstract

Pusat Anugerah Village-Owned Enterprise (Badan Usaha Milik Kampung—BUMKam) in Yuwanain Village, Arso District, Keerom Regency, remains at an early stage of development and faces challenges related to institutional governance, financial administration, business-asset certainty, role distribution, and marketing. This thematic community service program aimed to identify institutional and operational problems, map local economic potential, and provide initial assistance for developing BUMKam business activities. The program employed a participatory approach through field observations, semi-structured interviews, cross-stakeholder discussions, and documentation. Participants involved village government officials, BUMKam managers, farmers, the management of Taruna Jaya Art Studio, and community members with knowledge of local economic activities. The intervention comprised business-potential mapping, the preparation of an initial Business Model Canvas, digital-marketing education, and financial-recording training using the SIAPIK application. The findings revealed inconsistent information regarding agricultural land and productive assets, incomplete transaction records, overlapping managerial responsibilities, limited marketing coverage, and the underutilization of agricultural, livestock, fisheries, cultural, sports-tourism, and home-industry potential. The program produced a structured map of institutional problems and local economic opportunities, alternative directions for business development, and an initial framework for improving business planning, transparency, marketing, and financial recording. Program sustainability requires asset inventory and clarification, written cooperation arrangements, clearer managerial responsibilities, routine transaction recording, business-model validation, periodic mentoring, and collaboration among the village government, BUMKam managers, the community, and higher education institutions.

Keywords: Business Model Canvas; economic empowerment; potential mapping; SIAPIK; village-owned enterprise

Abstrak

Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Pusat Anugerah di Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom masih berada pada tahap perintisan dan menghadapi permasalahan dalam tata kelola kelembagaan, administrasi keuangan, kepastian aset usaha, pembagian tugas pengurus, dan pemasaran. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik ini bertujuan mengidentifikasi permasalahan kelembagaan dan operasional, memetakan potensi ekonomi lokal, serta memberikan pendampingan awal bagi pengembangan usaha BUMKam. Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, diskusi lintas pemangku kepentingan, dan dokumentasi. Pihak yang dilibatkan meliputi pemerintah kampung, pengurus BUMKam, petani, pengelola Sanggar Tari Taruna Jaya, serta masyarakat yang mengetahui aktivitas ekonomi kampung. Intervensi mencakup pemetaan potensi usaha, penyusunan rancangan awal Business Model Canvas, edukasi pemasaran digital, dan pelatihan pencatatan keuangan menggunakan aplikasi SIAPIK. Hasil kegiatan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan informasi mengenai lahan dan aset produktif, belum tertibnya dokumentasi transaksi, perangkapan tugas pengurus, terbatasnya jangkauan pemasaran, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pertanian,

peternakan, perikanan, seni budaya, wisata olahraga, dan produk olahan rumah tangga. Kegiatan menghasilkan peta masalah kelembagaan dan potensi ekonomi yang lebih terstruktur, alternatif arah pengembangan usaha, serta kerangka awal untuk memperkuat perencanaan, transparansi, pemasaran, dan pencatatan keuangan. Keberlanjutan program memerlukan inventarisasi dan penegasan status aset, penyusunan dokumen kerja sama, pembagian tugas yang jelas, pencatatan transaksi secara rutin, validasi model usaha, pendampingan berkala, serta kolaborasi antara pemerintah kampung, pengurus BUMKam, masyarakat, dan perguruan tinggi.

Kata kunci: BUMKam; Business Model Canvas; pemberdayaan ekonomi; pemetaan potensi; SIAPIK

1. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) memiliki posisi strategis sebagai lembaga ekonomi kampung yang memadukan fungsi sosial dan fungsi komersial. Melalui pengelolaan potensi lokal, BUMKam diharapkan mampu menyediakan pelayanan ekonomi, mengembangkan kegiatan usaha produktif, membuka peluang kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menegaskan bahwa pengelolaan badan usaha milik desa mencakup aspek kelembagaan, organisasi, rencana kerja, kepemilikan modal dan aset, pengembangan unit usaha, kerja sama, hingga pertanggungjawaban. Arah tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dengan kewenangan mengelola sumber daya dan kepentingan lokalnya. Dengan demikian, BUMKam tidak semata-mata berfungsi sebagai entitas pencari keuntungan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemandirian ekonomi kampung (Republik Indonesia, 2021, 2024).

Meskipun memiliki landasan hukum dan potensi ekonomi yang kuat, pembentukan BUMKam tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kinerja ekonomi kampung. Kajian mengenai badan usaha milik desa di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilannya dipengaruhi oleh kemampuan mengidentifikasi potensi lokal, kualitas tata kelola, partisipasi masyarakat, kompetensi pengurus, literasi keuangan, serta kapasitas membangun inovasi dan jejaring usaha. BUM Desa yang mampu mengombinasikan sumber daya lokal, partisipasi masyarakat, dan orientasi kewirausahaan memiliki peluang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan (Badaruddin et al., 2021; Kania et al., 2021). Namun, bukti empiris juga menunjukkan bahwa keberadaan BUM Desa belum selalu memberikan pengaruh yang kuat terhadap pembangunan perdesaan ketika tidak didukung oleh pengelolaan profesional, sumber pendapatan yang berkelanjutan, dan kapasitas kelembagaan yang memadai (Hilmawan et al., 2023).

Kapasitas pengurus menjadi salah satu faktor penting dalam keberlanjutan badan usaha milik desa. Literasi keuangan pengelola terbukti berhubungan positif dengan kinerja usaha karena membantu pengurus memahami kondisi keuangan, mengelola biaya, menilai keuntungan, dan mengambil keputusan bisnis secara lebih tepat (Nugroho et al., 2023). Selain itu, akuntabilitas BUM Desa tidak cukup diwujudkan melalui penyusunan laporan secara administratif, tetapi perlu didukung oleh praktik pencatatan, keterbukaan informasi, kejelasan tanggung jawab, dan partisipasi pemangku kepentingan (Fitriani et al., 2024). Orientasi kewirausahaan dan keterbukaan terhadap inovasi juga diperlukan agar BUM Desa mampu memperbaiki kinerja finansial maupun sosial dan tidak hanya menjalankan kegiatan usaha secara rutin tanpa arah pengembangan yang jelas (Wulandari & Wardani, 2024).

Permasalahan tersebut juga ditemukan pada BUMKam Pusat Anugerah di Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh tim Kuliah Kerja Nyata Tematik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih, BUMKam Pusat Anugerah dibentuk pada tahun 2023, memperoleh surat keputusan pada Oktober 2024, dan mulai menjalankan kegiatan usaha secara aktif pada akhir tahun 2025. Budidaya jagung ditetapkan sebagai unit usaha prioritas. Namun, kegiatan usaha tersebut masih berada pada tahap perintisan dengan jumlah pengurus yang terbatas serta ketergantungan pada lahan, peralatan produksi, dan tenaga kerja yang belum sepenuhnya berada dalam penguasaan BUMKam. Penanaman pertama dilaporkan mengalami kerugian, sedangkan penanaman berikutnya dimulai pada Juni 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan unit usaha jagung memerlukan kejelasan status aset, evaluasi terhadap model usaha, perhitungan biaya yang lebih akurat, dan pembagian tanggung jawab pengurus yang lebih tegas.

Hasil observasi dan wawancara awal juga menunjukkan bahwa administrasi dan pencatatan keuangan BUMKam masih dilakukan secara manual serta belum terdokumentasi secara lengkap. Bukti transaksi belum disimpan secara sistematis, informasi mengenai penggunaan lahan dan aktivitas usaha belum disampaikan secara konsisten, dan pemasaran hasil produksi masih terbatas pada masyarakat di sekitar Kampung Yuwanain. Keterbatasan tersebut menyebabkan pengurus kesulitan mengetahui posisi keuangan usaha, menghitung biaya produksi dan keuntungan, mengevaluasi hasil kegiatan, serta menyusun pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi. Persoalan pencatatan tidak hanya merupakan masalah teknis akuntansi, tetapi juga berhubungan dengan kualitas tata kelola dan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap BUMKam. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menempatkan kemampuan keuangan dan praktik akuntabilitas sebagai unsur penting dalam peningkatan kinerja badan usaha milik desa (Fitriani et al., 2024; Nugroho et al., 2023).

Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, Kampung Yuwanain memiliki sumber daya ekonomi yang beragam. Potensi yang teridentifikasi meliputi komoditas jagung, cabai, kol, jeruk manis, kelengkeng, kelapa dan pinang; peternakan sapi dan babi; budidaya ikan lele; produk olahan rumah tangga berupa roti dan kue tradisional; serta potensi ekonomi kreatif dan pariwisata melalui Sanggar Tari Taruna Jaya dan sirkuit *grasstrack*. Keragaman potensi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan BUMKam tidak harus bergantung pada satu komoditas. Namun, diversifikasi usaha perlu didasarkan pada analisis kebutuhan pasar, ketersediaan sumber daya, kepastian mitra, kemampuan pengelola, risiko usaha, dan potensi keberlanjutan. Penelitian mengenai perusahaan desa menunjukkan bahwa pertanian, pengolahan pangan lokal, pariwisata, layanan masyarakat, dan pemanfaatan pengetahuan lokal merupakan bidang yang potensial untuk dikembangkan menjadi inovasi ekonomi berbasis kampung (Kusumastuti et al., 2022).

Untuk menjembatani kesenjangan antara besarnya potensi kampung dan keterbatasan kapasitas pengelolaan BUMKam, diperlukan pendampingan yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, tetapi juga menghasilkan perangkat awal yang dapat digunakan oleh pengurus. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah *Business Model Canvas* (BMC), karena pendekatan model bisnis membantu organisasi menjelaskan bagaimana nilai diciptakan, disampaikan kepada pelanggan, dan dipertahankan melalui konfigurasi sumber daya, kegiatan, mitra, biaya, serta

penerimaan (Teece, 2010). Bentuk kanvas juga memudahkan pengurus dan pemangku kepentingan untuk mendiskusikan keterkaitan antara dimensi ekonomi, sosial, dan keberlanjutan secara visual serta partisipatif (Joyce & Paquin, 2016). Dalam kegiatan ini, penggunaan BMC dipadukan dengan pemetaan potensi kampung, pengenalan pemasaran digital, dan pelatihan pencatatan keuangan melalui aplikasi SIAPIK. Integrasi tersebut diarahkan agar pengurus tidak hanya mampu menentukan jenis usaha, tetapi juga memahami pelanggan sasaran, proposisi nilai, mitra utama, saluran pemasaran, struktur biaya, sumber pendapatan, dan kebutuhan dokumentasi keuangan.

Berdasarkan literatur yang ditelaah, penelitian dan artikel mengenai badan usaha milik desa di Indonesia lebih banyak membahas perannya dalam kewirausahaan perdesaan, pemberdayaan masyarakat, kinerja keuangan, inovasi, dan akuntabilitas secara terpisah (Fitriani et al., 2024; Kania et al., 2021; Nasfi et al., 2023; Wulandari & Wardani, 2024). Dokumentasi pengabdian yang mengintegrasikan perspektif ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi pada BUMKam yang masih berada dalam tahap perintisan—khususnya di wilayah Papua—masih relatif terbatas dalam literatur yang digunakan pada artikel ini. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini menawarkan kontribusi berupa model pendampingan awal yang menggabungkan diagnosis tata kelola, klarifikasi sumber daya dan aset, pemetaan potensi lokal, penyusunan model bisnis, penguatan pemasaran, serta pengenalan pencatatan keuangan digital dalam satu rangkaian kegiatan. Pernyataan mengenai keterbatasan kajian tersebut merupakan simpulan berdasarkan cakupan literatur yang ditelaah, bukan klaim bahwa belum pernah terdapat kegiatan serupa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi permasalahan kelembagaan, tata kelola, aset, dan administrasi BUMKam Pusat Anugerah; (2) memetakan potensi ekonomi Kampung Yuwanain yang dapat dikembangkan sebagai alternatif unit usaha; (3) mendampingi pengurus dalam menyusun arah pengembangan usaha menggunakan *Business Model Canvas*; serta (4) mengenalkan strategi pemasaran digital dan pencatatan keuangan sederhana melalui aplikasi SIAPIK. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan landasan awal bagi pengelolaan BUMKam yang lebih terencana, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis potensi riil Kampung Yuwanain.

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, dalam rangka KKN Tematik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih tahun 2026. Mitra utama kegiatan adalah pengurus BUMKam Pusat Anugerah. Pihak lain yang dilibatkan sebagai informan dan mitra pendukung meliputi pemerintah kampung, anggota Badan Musyawarah Kampung, petani, pengelola Sanggar Tari Taruna Jaya, serta masyarakat yang mengetahui kondisi sosial ekonomi dan aktivitas usaha di Kampung Yuwanain. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuannya mengenai kelembagaan, aset, kegiatan usaha, serta potensi ekonomi kampung.

Kegiatan menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif dengan dukungan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan partisipatif menempatkan mitra bukan hanya sebagai penerima program, tetapi sebagai pihak yang terlibat dalam mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi informasi, memetakan potensi, merumuskan alternatif solusi, dan merefleksikan hasil kegiatan. Pendekatan tersebut

sesuai dengan prinsip penelitian dan pemberdayaan partisipatif yang menekankan proses pembelajaran, refleksi, dan tindakan bersama masyarakat berdasarkan pengetahuan serta pengalaman lokal (Chambers, 1994; Cornwall & Jewkes, 1995).

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas enam tahapan, yaitu persiapan dan koordinasi, identifikasi kondisi awal, pemetaan potensi ekonomi, perancangan solusi, pelaksanaan pendampingan, serta evaluasi dan refleksi. Pada tahap persiapan, tim melakukan koordinasi dengan pemerintah kampung dan pengurus BUMKam untuk menyepakati ruang lingkup kegiatan, kebutuhan mitra, jadwal pelaksanaan, serta pihak-pihak yang perlu dilibatkan. Tim kemudian menyusun panduan observasi, pedoman wawancara semi-terstruktur, format pemetaan potensi, dan bahan pendampingan. Pedoman wawancara memuat pertanyaan mengenai sejarah pembentukan BUMKam, struktur dan pembagian tugas pengurus, status aset, sumber modal, kegiatan usaha, sistem pencatatan keuangan, pemasaran, kendala operasional, serta rencana pengembangan. Penggunaan pedoman semi-terstruktur memungkinkan tim mempertahankan keseragaman topik sekaligus menggali informasi lanjutan sesuai jawaban dan pengalaman setiap informan (Kallio et al., 2016).

Identifikasi kondisi awal dilakukan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, diskusi kelompok, telaah dokumen, dan dokumentasi lapangan. Observasi diarahkan pada kondisi kantor BUMKam, kelengkapan administrasi, bukti transaksi, lahan dan sarana produksi, kegiatan usaha, akses pemasaran, serta potensi ekonomi kampung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kelembagaan, aset produktif, pengalaman pengelolaan usaha, hubungan BUMKam dengan masyarakat, kendala yang dihadapi, dan kemungkinan pengembangan unit usaha. Telaah dokumen mencakup dokumen pembentukan, catatan kegiatan, catatan transaksi, serta dokumen pendukung lain yang dapat diakses oleh tim. Dokumentasi berupa foto, catatan lapangan, dan hasil diskusi digunakan sebagai bukti pelaksanaan sekaligus bahan untuk memeriksa konsistensi informasi.

Informasi dari masing-masing sumber tidak langsung diterima sebagai fakta tunggal, tetapi dibandingkan melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Keterangan pengurus BUMKam, pemerintah kampung, petani, Badan Musyawarah Kampung, pengelola sanggar, dan masyarakat dibandingkan untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun perbedaan informasi. Hasil wawancara juga diperiksa dengan hasil observasi, dokumen yang tersedia, dan kondisi lapangan. Triangulasi digunakan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan meningkatkan kredibilitas temuan kualitatif melalui perbandingan berbagai metode serta sumber informasi (Carter et al., 2014).

Data lapangan dianalisis menggunakan analisis deskriptif-tematik. Analisis dilakukan melalui proses membaca kembali catatan lapangan dan hasil wawancara, menandai informasi penting, memberikan kode awal, mengelompokkan kode ke dalam kategori, membandingkan informasi antarnarasumber, serta menyusun tema utama. Tema-tema tersebut meliputi kelembagaan dan pembagian tugas, administrasi dan akuntabilitas, pencatatan keuangan, status aset produktif, kegiatan operasional, pemasaran, jejaring kemitraan, dan potensi pengembangan usaha. Prosedur ini mengadaptasi tahapan analisis tematik berupa pengenalan data, pengodean, pembentukan tema, peninjauan tema, pendefinisian tema, dan penyusunan laporan (Braun & Clarke, 2006). Kredibilitas analisis diperkuat melalui diskusi antaranggota tim, pemeriksaan ulang catatan lapangan, dan konfirmasi terhadap informasi yang tidak konsisten kepada pihak terkait (Nowell et al., 2017).

Berdasarkan hasil identifikasi, tim menyusun peta masalah dan matriks potensi ekonomi Kampung Yuwanain. Potensi yang ditemukan dikelompokkan berdasarkan jenis sumber daya, pelaku yang terlibat, ketersediaan bahan baku, peluang pasar, kebutuhan modal, risiko, dan kemungkinan keterlibatan BUMKam. Hasil pemetaan selanjutnya digunakan untuk menyusun rancangan awal *Business Model Canvas* yang meliputi segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran pemasaran, hubungan pelanggan, sumber pendapatan, sumber daya utama, aktivitas utama, mitra utama, dan struktur biaya (Osterwalder & Pigneur, 2010). Penyusunan kanvas dilakukan secara partisipatif agar rancangan usaha tidak hanya mencerminkan penilaian tim, tetapi juga mempertimbangkan pengetahuan, kapasitas, dan prioritas mitra.

Tahap intervensi dilaksanakan melalui sosialisasi, diskusi partisipatif, studi kasus, demonstrasi, dan praktik langsung. Materi pendampingan mencakup penguatan kelembagaan dan pembagian tugas pengurus, transparansi administrasi, identifikasi peluang usaha, penyusunan model bisnis, strategi pemasaran digital, serta pencatatan transaksi keuangan sederhana. Dalam sesi pemasaran, peserta diperkenalkan pada pemanfaatan media sosial untuk menyampaikan informasi produk, menentukan sasaran konsumen, menyusun konten promosi, dan memperluas jaringan pemasaran. Pada sesi pencatatan keuangan, peserta dikenalkan dengan aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) melalui praktik memasukkan contoh transaksi penerimaan dan pengeluaran. SIAPIK digunakan karena aplikasi tersebut dikembangkan untuk membantu pelaku usaha melakukan pencatatan transaksi dan menghasilkan laporan keuangan secara digital (Bank Indonesia, 2022).

Evaluasi dilakukan secara formatif selama dan setelah pendampingan. Evaluasi proses mencakup kehadiran, keterlibatan dalam diskusi, kemampuan peserta menyampaikan masalah, serta kesediaan mitra memberikan data dan umpan balik. Evaluasi keluaran dilakukan dengan menilai tersusunnya peta masalah, matriks potensi ekonomi, rancangan awal *Business Model Canvas*, materi promosi, serta kemampuan awal peserta mempraktikkan pencatatan transaksi menggunakan SIAPIK. Refleksi bersama dilakukan untuk mengidentifikasi manfaat kegiatan, kendala pelaksanaan, kebutuhan pendampingan lanjutan, dan prioritas tindakan yang dapat dilaksanakan oleh BUMKam.

Kegiatan ini tidak menggunakan instrumen pretest dan pascates maupun rancangan evaluasi kuantitatif. Oleh karena itu, hasil evaluasi tidak digunakan untuk menyimpulkan perubahan pengetahuan atau kemampuan peserta secara statistik. Capaian kegiatan diinterpretasikan sebagai keluaran dan dampak awal berdasarkan pengamatan fasilitator, hasil kerja peserta, dokumentasi kegiatan, serta umpan balik mitra. Pendekatan pelaporan tersebut digunakan untuk menghindari klaim keberhasilan yang melampaui bukti yang tersedia.

3. Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Kondisi Awal dan Permasalahan Tata Kelola BUMKam

Hasil observasi, wawancara, dan telaah dokumentasi menunjukkan bahwa BUMKam Pusat Anugerah masih berada pada tahap perintisan kelembagaan dan usaha. Kantor BUMKam belum dimanfaatkan secara optimal sebagai pusat administrasi dan pengelolaan kegiatan. Aktivitas usaha masih berfokus pada budidaya jagung, sedangkan dokumen perencanaan usaha, pembagian tugas pengurus, pencatatan kegiatan operasional, dan agenda evaluasi berkala belum tersedia secara

lengkap. Kondisi tersebut menyebabkan proses pengelolaan usaha masih bergantung pada komunikasi informal dan pengetahuan masing-masing pengurus.

Pada aspek keuangan, transaksi usaha masih dicatat secara manual dan belum dilengkapi dengan pengarsipan bukti transaksi yang sistematis. Penerimaan, pengeluaran, biaya tenaga kerja, biaya sarana produksi, dan hasil penjualan belum dikelompokkan berdasarkan jenis transaksi maupun periode kegiatan. Akibatnya, arus kas usaha belum dapat ditelusuri secara konsisten dan pengurus mengalami kesulitan dalam menghitung biaya produksi, pendapatan, laba atau rugi, kebutuhan modal kerja, serta hasil usaha pada setiap periode penanaman.

Triangulasi sumber menemukan adanya perbedaan informasi mengenai status lahan budidaya jagung, bentuk kerja sama antara BUMKam dan masyarakat, sumber bibit, penggunaan peralatan, serta lokasi penyimpanan hasil panen. Perbedaan informasi tersebut tidak digunakan untuk menilai atau menyalahkan pihak tertentu, tetapi diperlakukan sebagai temuan kelembagaan yang memerlukan klarifikasi dan perbaikan dokumentasi. Temuan ini menunjukkan perlunya inventarisasi aset, perjanjian kerja sama tertulis, berita acara kegiatan, pembagian kewenangan, dan prosedur operasional yang dapat digunakan sebagai rujukan bersama oleh pengurus, pemerintah kampung, dan masyarakat.

Keterbatasan lainnya meliputi perangkapan tugas pengurus, penggunaan peralatan produksi yang masih dipinjam, belum tersedianya data biaya usaha secara terperinci, dan belum dilaksanakannya evaluasi usaha secara berkala. Kondisi tersebut meningkatkan ketergantungan kegiatan pada individu tertentu dan membatasi kemampuan BUMKam dalam melakukan pengawasan, evaluasi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Ringkasan permasalahan prioritas dan kebutuhan pendampingan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Identifikasi masalah prioritas BUMKam Pusat Anugerah

Aspek	Temuan lapangan	Risiko atau implikasi	Kebutuhan prioritas
Kelembagaan	Pembagian peran belum tegas dan terdapat perangkapan tugas pengurus.	Tumpang tindih kewenangan, ketergantungan pada individu tertentu, dan lemahnya pengawasan internal.	Uraian tugas, jadwal kerja, dokumentasi keputusan, dan forum evaluasi berkala.
Aset dan operasi	Informasi mengenai status lahan, bentuk kerja sama, peralatan, dan penyimpanan hasil belum konsisten.	Ketidakpastian penguasaan aset, kesulitan evaluasi usaha, dan potensi perbedaan pemahaman antarpemangku kepentingan.	Inventarisasi aset, dokumen kerja sama, berita acara, dan prosedur operasional standar.
Keuangan	Pencatatan manual dan bukti transaksi belum diarsipkan secara sistematis.	Arus kas, biaya produksi, pendapatan, dan hasil usaha tidak dapat ditelusuri secara memadai.	Buku kas, klasifikasi transaksi, pengarsipan bukti, rekonsiliasi berkala, dan penggunaan SIAPIK.
Pemasaran	Penjualan terbatas pada masyarakat di sekitar kampung.	Pasar sempit, ketergantungan pada pembeli lokal, dan rendahnya jangkauan informasi produk.	Identitas produk, informasi harga dan kapasitas pasokan, media promosi digital, serta perluasan jaringan pembeli.

Sumber: Hasil identifikasi tim KKN Tematik, 2026.

Pemetaan Potensi Ekonomi Kampung Yuwanain

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sumber daya ekonomi Kampung Yuwanain tidak hanya bertumpu pada budidaya jagung. Pada sektor pertanian, komoditas yang ditemukan meliputi jagung, cabai, kol, jeruk manis, kelengkeng, kelapa, dan pinang. Pada sektor peternakan dan perikanan terdapat pemeliharaan sapi dan babi serta budidaya ikan lele. Kampung Yuwanain juga memiliki potensi ekonomi kreatif dan jasa melalui Sanggar Tari Taruna Jaya, sirkuit *grasstrack*, serta produk olahan rumah tangga berupa roti dan kue tradisional.

Keragaman tersebut menunjukkan tersedianya peluang diversifikasi unit usaha BUMKam. Namun, tidak seluruh potensi dapat dikembangkan secara bersamaan karena setiap bidang memiliki kebutuhan modal, sumber daya manusia, aset, pasar, dan tingkat risiko yang berbeda. Oleh karena itu, hasil pemetaan tidak hanya berupa daftar sumber daya, tetapi juga pengelompokan alternatif usaha berdasarkan kesiapan dan horizon pengembangannya.

Budidaya jagung dapat tetap dipertahankan sebagai unit usaha jangka pendek dengan syarat status lahan, kepemilikan hasil, pembagian biaya, kebutuhan tenaga kerja, dan saluran penjualan diperjelas terlebih dahulu. Produk olahan rumah tangga berpotensi diuji dalam jangka pendek melalui sistem pemasaran kolektif karena tidak memerlukan investasi aset yang terlalu besar. Peternakan, budidaya lele, seni budaya, dan wisata olahraga dapat ditempatkan sebagai alternatif jangka menengah atau panjang setelah dilakukan kajian pasar, analisis kelayakan, dan pembentukan kemitraan yang lebih jelas.

Wawancara dengan pengelola Sanggar Tari Taruna Jaya menunjukkan adanya keterbukaan untuk berkolaborasi apabila BUMKam mengembangkan kegiatan wisata budaya. Potensi kerja sama tersebut memungkinkan BUMKam berperan sebagai penghubung pasar, penyusun paket kegiatan, pengelola promosi, atau mitra penyelenggaraan acara tanpa mengambil alih kepemilikan dan pengelolaan sanggar. Dengan demikian, pengembangan usaha dapat dilakukan melalui skema kolaboratif yang tetap mempertahankan peran masyarakat sebagai pelaku utama. Hasil pemetaan potensi dan alternatif peran BUMKam disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Potensi ekonomi dan alternatif arah pengembangan BUMKam

Kelompok potensi	Contoh komoditas atau kegiatan	Alternatif peran BUMKam	Horizon pengembangan
Pertanian	Jagung, cabai, kol, jeruk manis, kelengkeng, kelapa, dan pinang.	Pengadaan sarana produksi, produksi bersama, agregasi hasil, pengolahan, dan pemasaran.	Jangka pendek-menengah.
Peternakan dan perikanan	Sapi, babi, dan budidaya ikan lele.	Kemitraan produksi, penyediaan atau distribusi pakan, pengumpulan, dan pemasaran hasil.	Jangka menengah.
Seni budaya	Sanggar Tari Taruna Jaya.	Promosi, penyusunan paket pertunjukan, penghubung konsumen, dan kolaborasi wisata budaya.	Jangka menengah.
Wisata olahraga	Sirkuit <i>grasstrack</i> .	Dukungan penyelenggaraan acara, pengelolaan tiket dan parkir, promosi, serta pelibatan UMKM.	Jangka menengah-panjang.
Produk olahan	Roti dan kue tradisional.	Identitas merek kolektif, perbaikan kemasan, titip jual, promosi digital, dan agregasi pesanan.	Jangka pendek.

Sumber: Hasil pemetaan potensi Kampung Yuwanain, 2026.

Pelaksanaan Pendampingan BMC, Pemasaran Digital, dan SIAPIK

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dan pemetaan potensi, tim menyusun program pendampingan yang mengintegrasikan perspektif ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi, diskusi partisipatif, studi kasus, demonstrasi, dan latihan sederhana. Materi disesuaikan dengan kondisi BUMKam yang masih berada pada tahap perintisan sehingga pembahasan lebih diarahkan pada kebutuhan dasar pengelolaan usaha.

Pada aspek perencanaan usaha, *Business Model Canvas* (BMC) digunakan untuk membantu pengurus menghubungkan sembilan elemen utama model usaha, yaitu segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran pemasaran, hubungan pelanggan, sumber pendapatan, sumber daya utama, kegiatan utama, mitra utama, dan struktur biaya. Dalam pembahasan usaha jagung, pengurus diarahkan untuk mengidentifikasi status dan kebutuhan lahan, sumber bibit, tenaga kerja, biaya transportasi, risiko gagal panen, calon pembeli, mekanisme penetapan harga, pola pembagian hasil, dan kebutuhan kemitraan. Rancangan yang dihasilkan masih bersifat awal karena belum didukung oleh data biaya dan permintaan pasar yang lengkap.

Pendampingan pemasaran digital diarahkan pada penyusunan informasi produk yang dapat dipahami calon pembeli. Materi meliputi penentuan nama dan identitas produk, penyediaan foto produk, pencantuman harga, kapasitas pasokan, waktu ketersediaan, nomor kontak, lokasi usaha, serta penggunaan media sosial sebagai saluran komunikasi. Tim juga menekankan bahwa promosi digital tidak hanya berarti mengunggah foto, tetapi memerlukan konsistensi informasi, respons terhadap calon pelanggan, dan kepastian kemampuan memenuhi pesanan.

Pada aspek keuangan, pengenalan SIAPIK difokuskan pada pencatatan transaksi penerimaan, pengeluaran, pembelian, penjualan, modal, dan biaya operasional. Peserta mengikuti demonstrasi alur pencatatan transaksi dan pengenalan bentuk laporan sederhana yang dapat dihasilkan oleh aplikasi. Penekanan utama diberikan pada kedisiplinan mengumpulkan bukti transaksi dan melakukan pencatatan tepat waktu karena penggunaan aplikasi tidak akan menghasilkan informasi yang akurat apabila data dasarnya tidak lengkap.

Keluaran dan capaian awal yang dapat diamati selama kegiatan disajikan pada Tabel 3. Istilah capaian awal digunakan karena kegiatan tidak dilengkapi dengan instrumen pretest dan pascates yang memungkinkan pengukuran perubahan kemampuan secara kuantitatif.

Tabel 3. Program pendampingan dan capaian awal yang teramati

Program	Bentuk kegiatan	Keluaran	Capaian awal yang teramati
Identifikasi dan klarifikasi	Observasi, wawancara, telaah dokumen, serta diskusi lintas narasumber.	Peta masalah kelembagaan, aset, operasi, keuangan, dan pemasaran.	Permasalahan yang sebelumnya tersebar dapat dikelompokkan menjadi kebutuhan tindak lanjut yang lebih terstruktur.
Pemetaan potensi	Inventarisasi potensi pertanian, peternakan, perikanan, budaya, wisata, dan produk olahan.	Matriks potensi dan horizon pengembangan.	Tersusun alternatif usaha di luar jagung beserta kemungkinan peran BUMKam.
<i>Business Model Canvas</i>	Diskusi sembilan elemen model bisnis dan penerapannya pada	Rancangan awal model usaha.	Pengurus mulai mengidentifikasi pelanggan, mitra, aktivitas, sumber daya,

	usaha jagung serta alternatif usaha.		biaya, dan sumber pendapatan dalam satu kerangka.
Pemasaran digital	Edukasi mengenai identitas produk, konten, media sosial, informasi harga, dan jaringan pasar.	Daftar kebutuhan informasi produk dan materi promosi awal.	Pengurus dapat mengidentifikasi informasi yang harus tersedia sebelum promosi dilakukan.
Pencatatan SIAPIK	Demonstrasi dan latihan pencatatan transaksi sederhana.	Contoh pencatatan transaksi dan pengenalan bentuk laporan.	Peserta mengikuti alur pencatatan serta menyadari pentingnya pengarsipan bukti transaksi dan pencatatan berkala.

Sumber: Dokumentasi dan evaluasi kegiatan KKN Tematik, 2026.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan: (a) kunjungan Dosen Pendamping Lapangan; (b) koordinasi dengan aparat kampung dan pengurus BUMKam; (c) pemetaan potensi Sanggar Tari Taruna Jaya; dan (d) sosialisasi BMC serta pelatihan SIAPIK.

Sumber: Dokumentasi tim KKN Tematik FEB Universitas Cenderawasih, 2026.

Capaian Awal dan Refleksi Pelaksanaan

Kegiatan menghasilkan tiga keluaran utama, yaitu peta masalah pengelolaan BUMKam, mariks potensi ekonomi Kampung Yuwanain, dan rancangan awal model usaha yang dapat digunakan sebagai bahan diskusi lanjutan. Pendampingan juga memperkenalkan prosedur dasar pencatatan transaksi dan pemasaran digital. Keluaran tersebut belum dapat diperlakukan sebagai bukti peningkatan kinerja usaha, tetapi menjadi perangkat awal untuk menata proses pengambilan keputusan BUMKam.

Selama kegiatan, pengurus mulai mengarahkan pembahasan usaha pada pertanyaan yang lebih operasional. Diskusi tidak lagi hanya berfokus pada jenis komoditas yang tersedia, tetapi juga mencakup status aset, calon pelanggan, kapasitas produksi, biaya, risiko, mitra, mekanisme penjualan, dan sumber pendapatan. Perubahan fokus diskusi tersebut merupakan indikasi awal bahwa penggunaan peta masalah dan BMC membantu mitra melihat hubungan antarkomponen usaha secara lebih sistematis.

Bagi mahasiswa, perbedaan keterangan antarnarasumber memberikan pembelajaran mengenai pentingnya triangulasi, komunikasi yang etis, dan kehati-hatian dalam menyimpulkan informasi lapangan. Kolaborasi mahasiswa dari bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi juga memungkinkan permasalahan BUMKam dianalisis secara lebih menyeluruh. Potensi sumber daya dikaji dari perspektif ekonomi, rancangan aktivitas dan pasar dianalisis dari perspektif manajemen, sedangkan dokumentasi transaksi dan pertanggungjawaban dikaji dari perspektif akuntansi.

Pembahasan

Tata Kelola dan Dokumentasi sebagai Fondasi Pengembangan BUMKam

Temuan utama kegiatan menunjukkan bahwa persoalan BUMKam Pusat Anugerah tidak hanya terletak pada pencatatan keuangan yang masih manual, tetapi juga pada belum terbentuknya rantai dokumentasi yang menghubungkan aset, kegiatan operasional, transaksi, keputusan, dan pertanggungjawaban. Perbedaan informasi mengenai lahan, peralatan, dan kerja sama menunjukkan bahwa pengembangan unit usaha perlu didahului dengan penataan kelembagaan dan klarifikasi dasar penguasaan sumber daya. Tanpa fondasi tersebut, data biaya dan pendapatan yang dicatat berisiko tidak menggambarkan aktivitas usaha secara utuh.

Hasil ini melengkapi kegiatan Hanifa et al. (2022), yang menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan dapat meningkatkan pengetahuan dasar pengurus BUMDes dalam menganalisis, mencatat, dan menyusun laporan transaksi. Dalam konteks BUMKam Pusat Anugerah, peningkatan keterampilan akuntansi perlu didahului oleh penentuan pihak yang bertanggung jawab, identifikasi transaksi BUMKam, kejelasan aset yang digunakan, dan pengumpulan bukti transaksi. Dengan demikian, digitalisasi pencatatan bukan merupakan langkah pertama yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian perbaikan tata kelola.

Temuan tersebut juga menunjukkan pentingnya membedakan masalah administratif dan masalah substantif. Ketidaktersediaan buku kas merupakan masalah administratif, sedangkan ketidakjelasan status aset dan bentuk kerja sama merupakan masalah substantif yang memengaruhi validitas pencatatan. Oleh karena itu, pendampingan selanjutnya perlu menggabungkan inventarisasi aset, penyusunan dokumen kerja sama, penetapan kewenangan, dan pencatatan transaksi. Pendekatan ini akan membantu BUMKam menghasilkan informasi yang tidak hanya rapi secara administratif, tetapi juga dapat diverifikasi.

Pemetaan Potensi sebagai Dasar Penentuan Prioritas Usaha

Hasil pemetaan memperlihatkan bahwa Kampung Yuwanain memiliki aset ekonomi yang beragam, baik dalam bentuk sumber daya alam, keterampilan masyarakat, kegiatan budaya, maupun sarana olahraga. Temuan tersebut sejalan

dengan kegiatan Srirejeki et al. (2020), yang menggunakan pendekatan *asset-based community-driven development* untuk memetakan potensi desa sebagai dasar penguatan BUMDes. Pendekatan berbasis aset menempatkan sumber daya yang telah dimiliki masyarakat sebagai titik awal pengembangan, bukan hanya berfokus pada kekurangan dan masalah desa.

Pemetaan berbasis partisipasi juga pernah diterapkan oleh Nugraha (2021), yang menunjukkan bahwa data mengenai potensi alam, sosial, ekonomi, kelembagaan, dan infrastruktur dapat digunakan sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan desa. Namun, penelitian pengabdian tersebut juga menemukan bahwa keberadaan potensi tidak serta-merta menjamin pengembangannya karena masih terdapat faktor penghambat, seperti aksesibilitas dan kesiapan pendukung. Temuan ini relevan dengan Kampung Yuwanain, sebab keragaman komoditas dan kegiatan belum otomatis dapat dikonversi menjadi unit usaha BUMKam tanpa kepastian pasar, kapasitas pengurus, aset, dan model kemitraan.

Kontribusi pemetaan dalam kegiatan ini terletak pada pengelompokan potensi berdasarkan horizon pengembangan. Jagung dan produk olahan ditempatkan sebagai peluang jangka pendek, sedangkan peternakan, seni budaya, dan wisata olahraga memerlukan persiapan jangka menengah atau panjang. Pengelompokan tersebut mencegah BUMKam mengembangkan terlalu banyak unit usaha secara bersamaan. Strategi bertahap lebih sesuai dengan kondisi organisasi yang masih memiliki keterbatasan pengurus, modal, dokumentasi, dan pengalaman manajerial.

Pemetaan juga memperlihatkan bahwa BUMKam tidak harus menjadi produsen langsung pada seluruh sektor. Pada kegiatan seni budaya dan produk olahan, BUMKam dapat mengambil fungsi sebagai agregator, promotor, penghubung pasar, atau penyelenggara kemitraan. Model tersebut memungkinkan pengembangan usaha tanpa menghilangkan kepemilikan dan peran masyarakat. Oleh karena itu, pemetaan potensi perlu dilanjutkan dengan penilaian kelayakan yang mencakup kebutuhan pasar, struktur biaya, ketersediaan pengelola, risiko, dan manfaat bagi masyarakat.

BMC sebagai Instrumen Klarifikasi dan Perancangan Usaha

Penggunaan BMC membantu mengubah daftar potensi menjadi rancangan usaha yang lebih operasional. Temuan ini sejalan dengan pengabdian Awaluddin (2021), yang menunjukkan bahwa pelatihan analisis SWOT dan BMC dapat membangun kesadaran serta kesiapan kelompok masyarakat dalam merintis dan mengembangkan BUMDes. Dalam kegiatan tersebut, BMC digunakan untuk memetakan produk unggulan, pelanggan, proposisi nilai, saluran pemasaran, mitra, dan komponen operasional lainnya.

Hasil yang serupa dilaporkan Kusumawardani (2024) pada pendampingan BUMDes Jatirejo. Penggunaan BMC menghasilkan empat alternatif ide bisnis berdasarkan aset yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut memperlihatkan bahwa BMC dapat digunakan bukan hanya untuk menggambarkan usaha yang telah berjalan, tetapi juga untuk mengeksplorasi pemanfaatan aset dan alternatif unit usaha baru.

Dalam kegiatan di Kampung Yuwanain, fungsi utama BMC belum sampai pada penyusunan rencana bisnis final. BMC lebih tepat diposisikan sebagai instrumen klarifikasi untuk mengungkap informasi yang masih belum tersedia, seperti siapa pemilik atau penguasa sumber daya, siapa pelanggan utama, berapa kapasitas produksi, bagaimana mekanisme penjualan, serta biaya apa saja yang harus

ditanggung BUMKam. Posisi tersebut penting agar BMC tidak hanya menjadi lembar kanvas yang diisi secara normatif tanpa didukung data lapangan.

Rancangan awal BMC perlu divalidasi melalui pencatatan biaya aktual, wawancara calon pembeli, uji pasar, penghitungan kapasitas produksi, dan kesepakatan dengan mitra. Dengan demikian, keberhasilan pendampingan BMC tidak seharusnya hanya diukur dari tersusunnya sembilan elemen kanvas, tetapi dari kemampuan BUMKam menguji asumsi dan memperbaiki model usaha berdasarkan bukti.

Pemasaran Digital dan Pencatatan Keuangan sebagai Kapabilitas yang Saling Mendukung

Pengenalan pemasaran digital relevan dengan kebutuhan BUMKam untuk memperluas jangkauan informasi produk. Sanjaya et al. (2020) menunjukkan bahwa penerapan sistem pemasaran digital pada pengelola BUMDes dapat mendukung promosi dan penguatan kapasitas pengelola. Lawelai et al. (2023) juga menemukan bahwa pelatihan pemasaran digital membantu pengelola BUMDes memahami pemanfaatan situs dan media sosial untuk menyampaikan informasi produk serta memperluas jangkauan promosi.

Meskipun demikian, pemasaran digital tidak dapat dipisahkan dari kesiapan operasional. Promosi yang dilakukan sebelum BUMKam memiliki kepastian mengenai harga, kualitas, jumlah produksi, jadwal ketersediaan, dan mekanisme pengiriman dapat menimbulkan kesenjangan antara informasi promosi dan kemampuan memenuhi pesanan. Oleh karena itu, kegiatan ini menempatkan penyusunan informasi produk sebagai langkah awal sebelum penggunaan media sosial secara lebih intensif.

Pada aspek keuangan, pengenalan SIAPIK dapat membantu pengurus melakukan pencatatan transaksi dan menghasilkan informasi keuangan secara lebih terstruktur. Yuniar et al. (2024) melaporkan bahwa pelatihan SIAPIK pada usaha jasa meningkatkan pemahaman peserta mengenai aplikasi dan laporan akuntansi serta keterampilan pencatatan transaksi. Hasil tersebut menunjukkan potensi SIAPIK sebagai alat pembelajaran sekaligus sarana digitalisasi pencatatan.

Berbeda dengan penelitian Yuniar et al. (2024) yang menggunakan pengukuran perubahan pengetahuan dan keterampilan, kegiatan di Kampung Yuwanain belum menggunakan instrumen prates dan pascates. Oleh karena itu, hasil kegiatan ini tidak dapat diklaim telah meningkatkan keterampilan penggunaan SIAPIK secara terukur. Capaian yang dapat dinyatakan terbatas pada pengenalan alur aplikasi, latihan pencatatan, dan munculnya kesadaran awal mengenai pentingnya bukti transaksi.

Integrasi pemasaran dan pencatatan keuangan memiliki arti penting bagi keberlanjutan usaha. Pemasaran menghasilkan permintaan dan transaksi, sedangkan pencatatan keuangan menyediakan informasi mengenai hasil penjualan, biaya pemasaran, piutang, penerimaan kas, dan laba atau rugi. Apabila kedua fungsi tersebut berjalan secara terpisah, BUMKam dapat mengalami peningkatan aktivitas penjualan tanpa mampu mengevaluasi apakah aktivitas tersebut menghasilkan keuntungan.

Kontribusi dan Implikasi Model Pendampingan

Dibandingkan dengan artikel pengabdian yang digunakan dalam pembahasan ini, kegiatan di Kampung Yuwanain mengintegrasikan lima tahapan yang sering dilaksanakan secara terpisah, yaitu diagnosis tata kelola, klarifikasi aset dan kegiatan usaha, pemetaan potensi ekonomi, penyusunan model bisnis, serta pengenalan

pemasaran dan pencatatan digital. Integrasi tersebut sesuai dengan karakter permasalahan BUMKam Pusat Anugerah yang tidak hanya berkaitan dengan kurangnya keterampilan teknis, tetapi juga dengan kelembagaan, informasi, aset, pasar, dan akuntabilitas.

Pendampingan ini menghasilkan urutan pengembangan yang lebih realistis. Tahap pertama adalah memperjelas kelembagaan, tugas, aset, kerja sama, dan arsip transaksi. Tahap kedua adalah memvalidasi kelayakan unit usaha melalui data biaya, kapasitas, pelanggan, dan risiko. Tahap ketiga adalah menerapkan pencatatan digital dan pemasaran berdasarkan informasi produk yang telah dipastikan. Tahap terakhir adalah melakukan pemantauan terhadap arus kas, penjualan, capaian usaha, dan manfaat bagi masyarakat.

Pendekatan lintas disiplin menjadi relevan karena persoalan BUMKam saling berhubungan. Keputusan mengenai jenis usaha memiliki konsekuensi ekonomi; pengorganisasian produksi, kemitraan, dan pemasaran memerlukan kemampuan manajemen; sedangkan pengendalian biaya dan pertanggungjawaban memerlukan sistem akuntansi. Dengan demikian, pendampingan yang hanya berfokus pada satu aplikasi atau satu jenis pelatihan berisiko tidak menyelesaikan akar masalah.

Capaian kegiatan tetap perlu ditafsirkan sebagai keluaran dan dampak awal, bukan bukti peningkatan kinerja usaha secara kausal. Implementasi BMC, pemasaran digital, dan SIAPIK memerlukan pendampingan lanjutan, pemantauan transaksi, validasi pasar, dan evaluasi perkembangan usaha. Uraian yang lebih terperinci mengenai keterbatasan kegiatan dapat ditempatkan pada Subbab 4.2 agar tidak terjadi pengulangan antara bagian pembahasan dan bagian keterbatasan.

4. Kesimpulan

Pendampingan di Kampung Yuwanain menunjukkan bahwa BUMKam Pusat Anugerah memiliki prospek untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi kampung, tetapi masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar pada aspek tata kelola kelembagaan, kepastian aset usaha, pembagian tugas pengurus, dokumentasi keuangan, dan pemasaran. Hasil pemetaan memperlihatkan bahwa Kampung Yuwanain memiliki potensi ekonomi yang beragam, meliputi sektor pertanian, peternakan dan perikanan, seni budaya, wisata olahraga, serta produk olahan rumah tangga. Potensi tersebut dapat dikembangkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia, kepastian aset, kebutuhan modal, peluang pasar, dan tingkat risiko usaha.

Kegiatan KKN Tematik telah menghasilkan peta masalah dan potensi ekonomi kampung, rancangan awal *Business Model Canvas*, edukasi mengenai pemasaran digital, serta pengenalan aplikasi SIAPIK untuk mendukung pencatatan transaksi yang lebih tertib dan sistematis. Capaian kegiatan masih berada pada tahap peningkatan pemahaman awal dan penyediaan perangkat pendukung pengelolaan usaha. Oleh karena itu, hasil kegiatan belum dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya peningkatan kinerja usaha, pendapatan, maupun keberlanjutan BUMKam dalam jangka panjang.

Keberlanjutan program memerlukan tindak lanjut berupa inventarisasi aset, penyusunan dokumen kerja sama, penegasan pembagian tugas pengurus, pencatatan transaksi secara rutin, validasi model bisnis melalui data biaya dan permintaan pasar, serta pelaksanaan evaluasi usaha secara berkala. Pemerintah kampung, pengurus BUMKam, masyarakat, dan perguruan tinggi perlu membangun pola pendampingan

yang kolaboratif dan berkelanjutan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan BUMKam dalam mengembangkan unit usaha yang sesuai dengan potensi riil serta kebutuhan masyarakat Kampung Yuwanain.

4. Daftar Pustaka

- Awaluddin, R. (2021). Pelatihan pengembangan bisnis BUMDes dengan analisis SWOT dan *Business Model Canvas* di Desa Lengkon, Kuningan. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 116–125. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i02.4043>
- Badaruddin, B., Kariono, K., Ermansyah, E., & Sudarwati, L. (2021). Village community empowerment through village owned enterprise based on social capital in North Sumatera. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, 31(3), 163–175. <https://doi.org/10.1080/02185385.2020.1765855>
- Bank Indonesia. (2022, 7 Maret). *Dorong UMKM naik kelas melalui penggunaan aplikasi pencatatan keuangan* [Siaran pers No. 24/73/DKom]. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_247322.aspx
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90141-4](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90141-4)
- Cornwall, A., & Jewkes, R. (1995). What is participatory research? *Social Science & Medicine*, 41(12), 1667–1676. [https://doi.org/10.1016/0277-9536\(95\)00127-S](https://doi.org/10.1016/0277-9536(95)00127-S)
- Fitriani, D., Md Shahbudin, A. S., & Shauki, E. R. (2024). Exploring BUMDES accountability: Balancing expectations and reality. *Cogent Business & Management*, 11(1), Article 2402083. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2402083>
- Hanifa, L., Amalia, A., Sugianto, R., & Defilia, D. (2022). Pelatihan penyusunan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan standar akuntansi keuangan di Desa Kabawakole. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(3), 98–104. <https://doi.org/10.51214/japamul.v2i3.344>
- Hilmawan, R., Aprianti, Y., Vo, D. T. H., Yudaruddin, R., Bintoro, R. F. A., Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Rural development from village funds, village-owned enterprises, and village original income. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(4), Article 100159. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100159>
- Joyce, A., & Paquin, R. L. (2016). The triple layered business model canvas: A tool to design more sustainable business models. *Journal of Cleaner Production*, 135, 1474–1486. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.06.067>
- Kallio, H., Pietilä, A. M., Johnson, M., & Kangasniemi, M. (2016). Systematic methodological review: Developing a framework for a qualitative semi-

- structured interview guide. *Journal of Advanced Nursing*, 72(12), 2954–2965. <https://doi.org/10.1111/jan.13031>
- Kania, I., Anggadwita, G., & Alamanda, D. T. (2021). A new approach to stimulate rural entrepreneurship through village-owned enterprises in Indonesia. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 15(3), 432–450. <https://doi.org/10.1108/JEC-07-2020-0137>
- Kusumastuti, R., Silalahi, M., Asmara, A. Y., Hardiyati, R., & Juwono, V. (2022). Finding the context indigenous innovation in village enterprise knowledge structure: A topic modeling. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 11(1), Article 19. <https://doi.org/10.1186/s13731-022-00220-9>
- Kusumawardani, C. D. (2024). Rancangan model bisnis produk menggunakan *Business Model Canvas* di Badan Usaha Milik Desa Jatirejo. *Jurnal ABDIRAJA*, 7(2), 141–148. <https://doi.org/10.24929/adr.v7i2.3687>
- Lawelai, H., Suherman, A., Sadat, A., Wijaya, A. A. M., & Hanifa, L. (2023). Digital marketing training to increase business competitiveness for village-owned enterprises (BUMDes) in South Buton Regency. *Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 31–37. <https://doi.org/10.55824/jpm.v2i1.233>
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Andi.
- Nasfi, Aimon, H., & Sentosa, S. U. (2023). Build the village economy: A systematic review on academic publication of Indonesian village-owned enterprises. *Cogent Social Sciences*, 9(2), Article 2252682. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2252682>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Nugraha, S. B. (2021). Pemetaan potensi Desa Ngesrepbalong berbasis masyarakat. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 21(2), 153–166. <https://doi.org/10.21580/dms.2021.212.6877>
- Nugroho, T. W., Rahman, M. S., Toiba, H., Andriatmoko, N. D., Hartono, R., & Shaleh, M. I. (2023). Does financial literacy matter for village-owned enterprises' performance? Evidence from East Java, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(2), Article 2263945. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2263945>
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers*. John Wiley & Sons.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa*. Database Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun->
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Database Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Sanjaya, P. K. A., Hartati, N. P. S., & Premayani, N. W. W. (2020). Pemberdayaan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berdikari melalui implementasi *digital marketing system*. *CARADDE: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 65–75. <https://doi.org/10.31960/caradde.v3i1.467>
- Srirejeki, K., Faturahman, A., Warsidi, W., Ulfah, P., & Herwiyanti, E. (2020). Pemetaan potensi desa untuk penguatan Badan Usaha Milik Desa dengan pendekatan

- asset-based community-driven development. Warta LPM, 23(1), 24–34.*
<https://doi.org/10.23917/warta.v23i1.8974>
- Teece, D. J. (2010). Business models, business strategy and innovation. *Long Range Planning, 43*(2–3), 172–194. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.003>
- Wulandari, F., & Wardani, M. K. (2024). Open innovation in village-owned enterprises: The role of entrepreneurial orientation in improving financial and social performance. *Cogent Business & Management, 11*(1), Article 2350079. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2350079>
- Yuniar, I., Widayanti, A., Kastaman, K., Santoso, A. A., Azzhara, D. P., & Azijah, S. N. (2024). Pelatihan pencatatan keuangan digital laundry dengan menggunakan aplikasi SIAPIK. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 8*(2), 264–270. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v8i2.6989>